



KAJIAN KONDISI TATA KELOLA HUTAN 2015

26 APRIL 2016, UNDP INDONESIA

UNITED NATIONS
**PARIS CLIMATE
AGREEMENT**

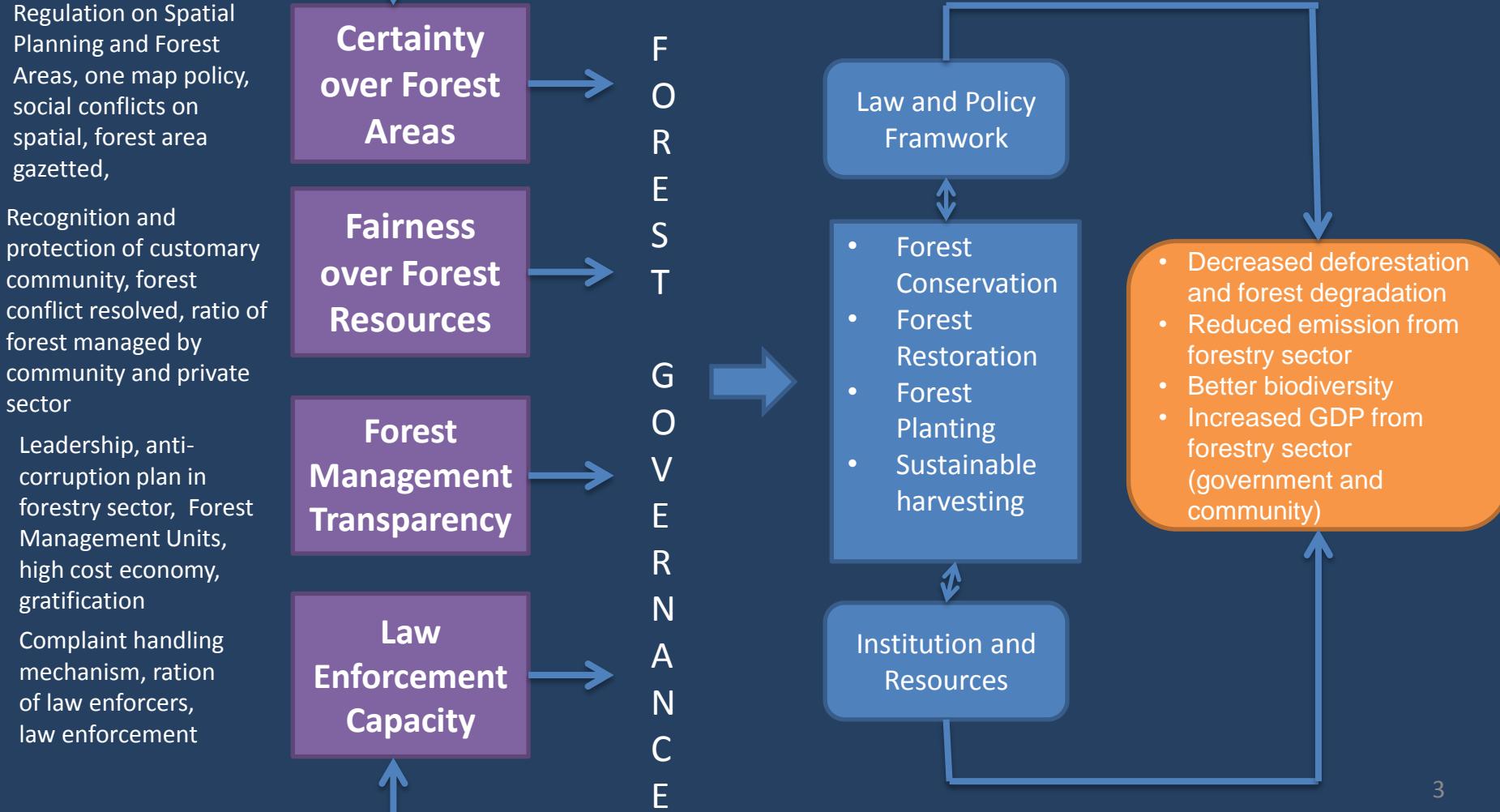
SIGNING CEREMONY

— 22 APRIL 2016 —



- 171 Negara menandatangani Kesepakatan Paris di Hari Bumi Internasional, 22 April
- Indonesia, 1 dari 171 Negara yang menandatangani Paris Agreement
- Berketetapan (NDC) mengurangi emisi 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan mitra internasional di tahun 2030

Forest Governance and Outcome



1 KAWASAN

(Peraturan, Klaim, % luas htn adat, Perda adat, % htn ditetapkan, % illog)

2 KEADILAN

(Aturan akses dan persaingan usaha, SOP konflik & resolusinya, peran CSO, dana u/ izin masy, rasio pemanfaatan oleh masy dan pengusaha besar)

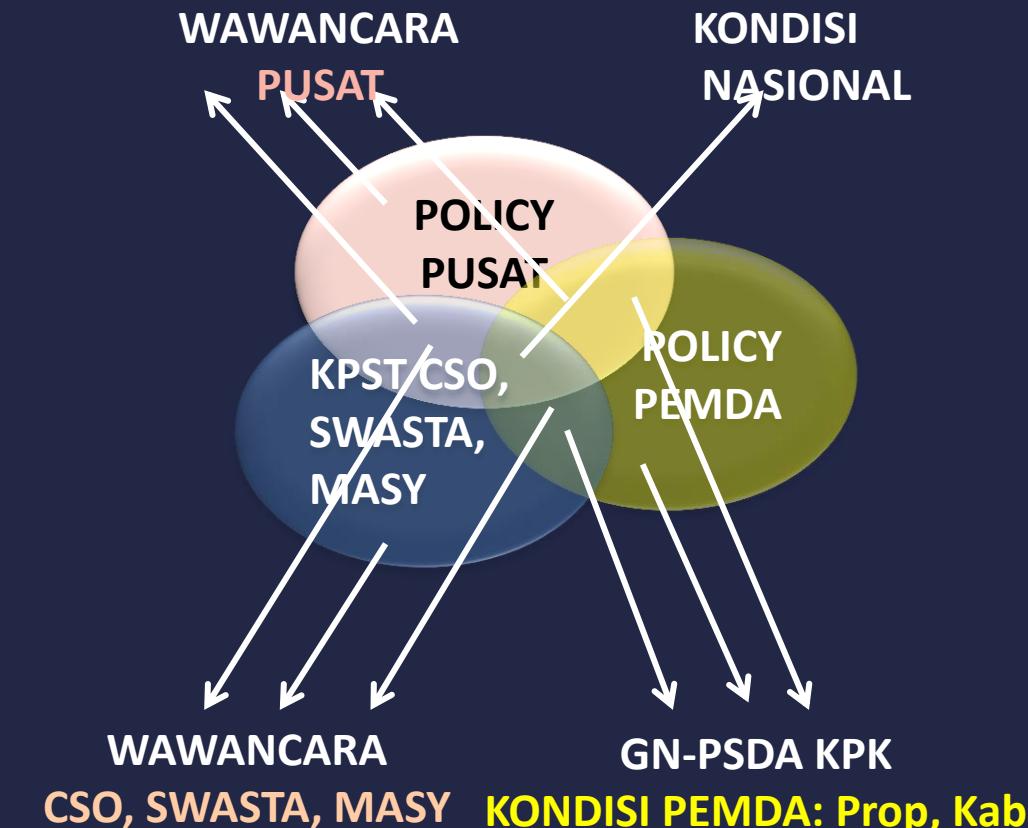
3 TRANSPARANSI

(Aturan pegawai, pencegahan korupsi, perizinan, GCG swasta, KPH operasi, CSO-awasi izin, biaya tdk resmi)

4 PENEGAKAN HUKUM

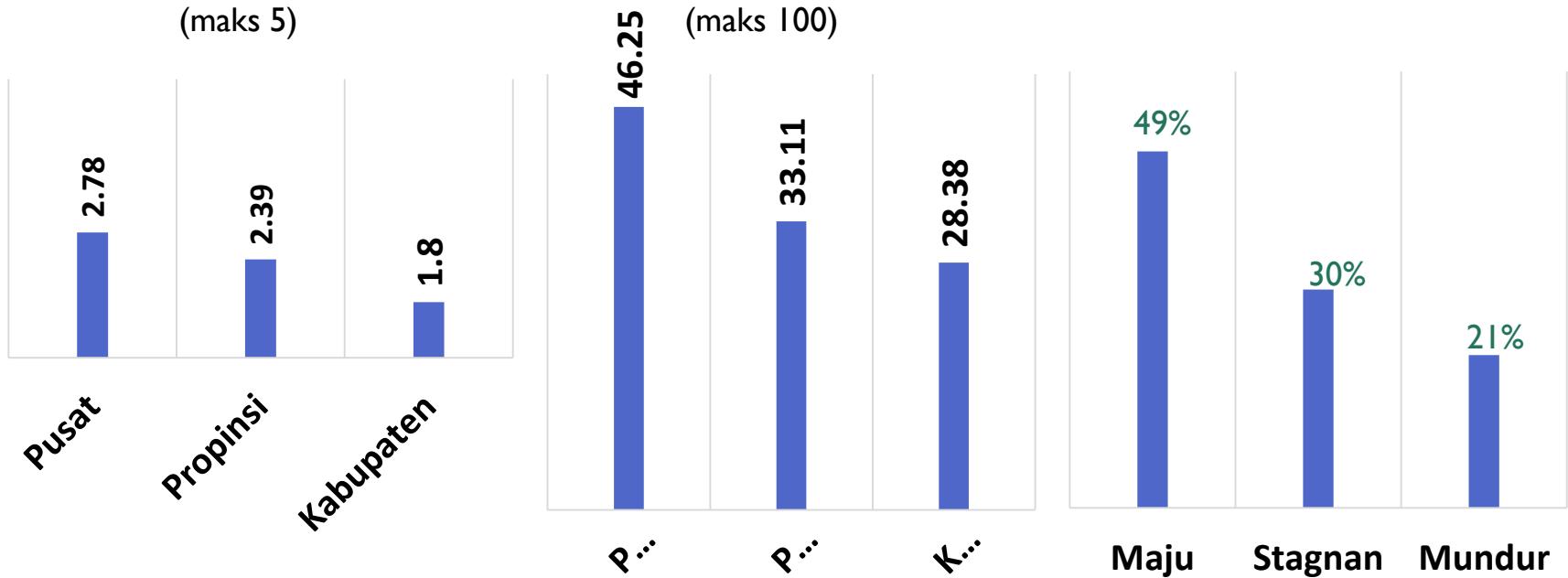
(Wistle blower, sert polisi dll multi rezim hukum, CSO-korupsi, rasio jaga wana, % pelanggaran korupsi)

KERANGAKA PENILAIAN TATA KELOLA HUTAN 2015



APA YANG KITA HADAPI?

DINAMIKA KONDISI TATA KELOLA HUTAN 2012, 2014, 2015

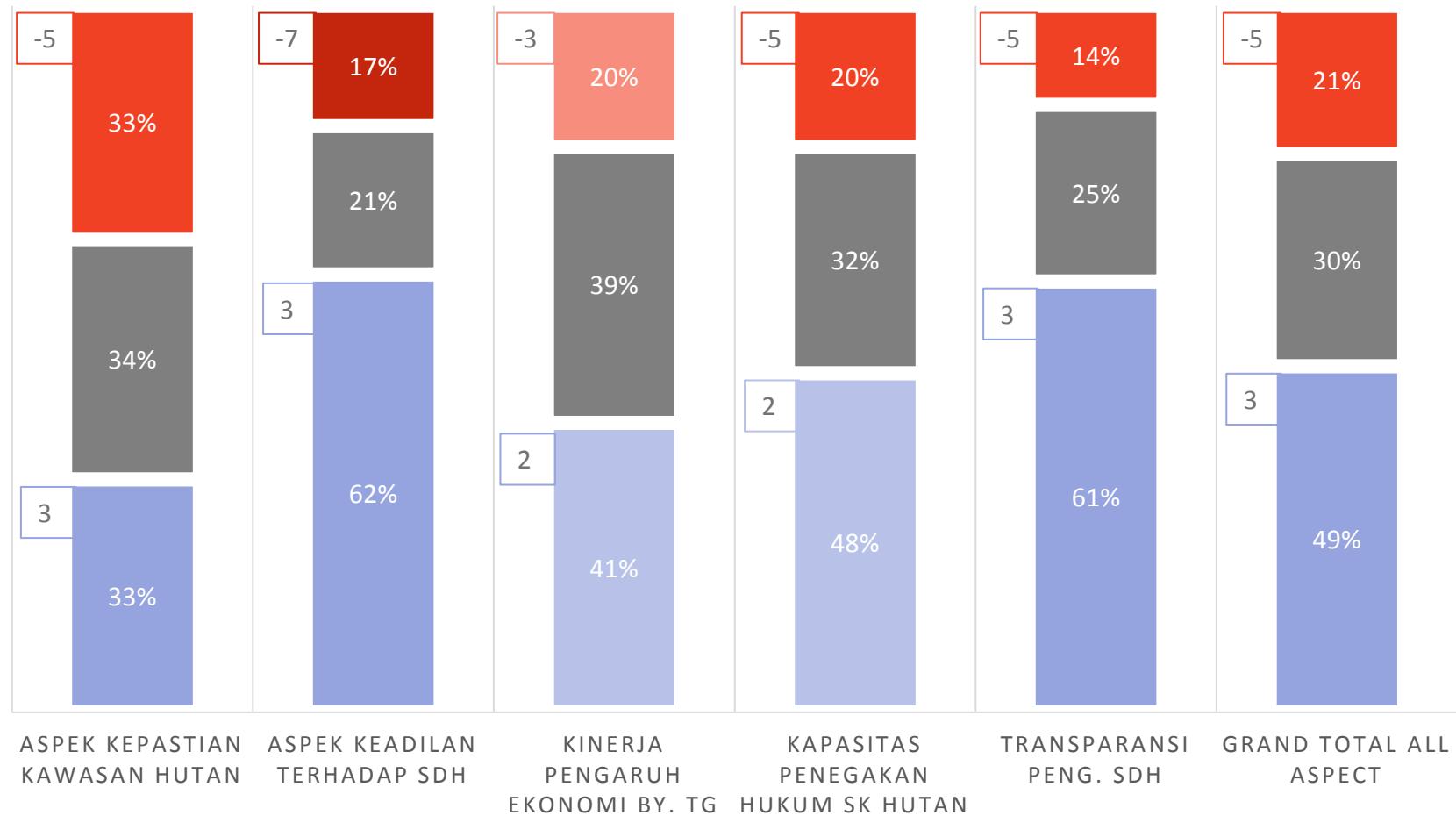


Indeks rata-rata tata kelola hutan, 2012
Keseluruhan 2,33

Indeks rata-rata tata kelola hutan,
2014
Keseluruhan 36

Survei key stakeholders Kondisi Tata
Kelola Hutan (n: 40 + 20 Private Sector),
2015

■ Maju ■ Stagnan ■ Mundur



SKALA

Positif

- 1-2
- 3-4
- 5-6
- 7-8
- 9-10

Negatif

- 1-2
- 3-4
- 5-6
- 7-8
- 9-10

Semakin pekat warnanya, semakin tinggi skalanya.

Capaian Renaksi GNPSDA 13 Propinsi-des 2015

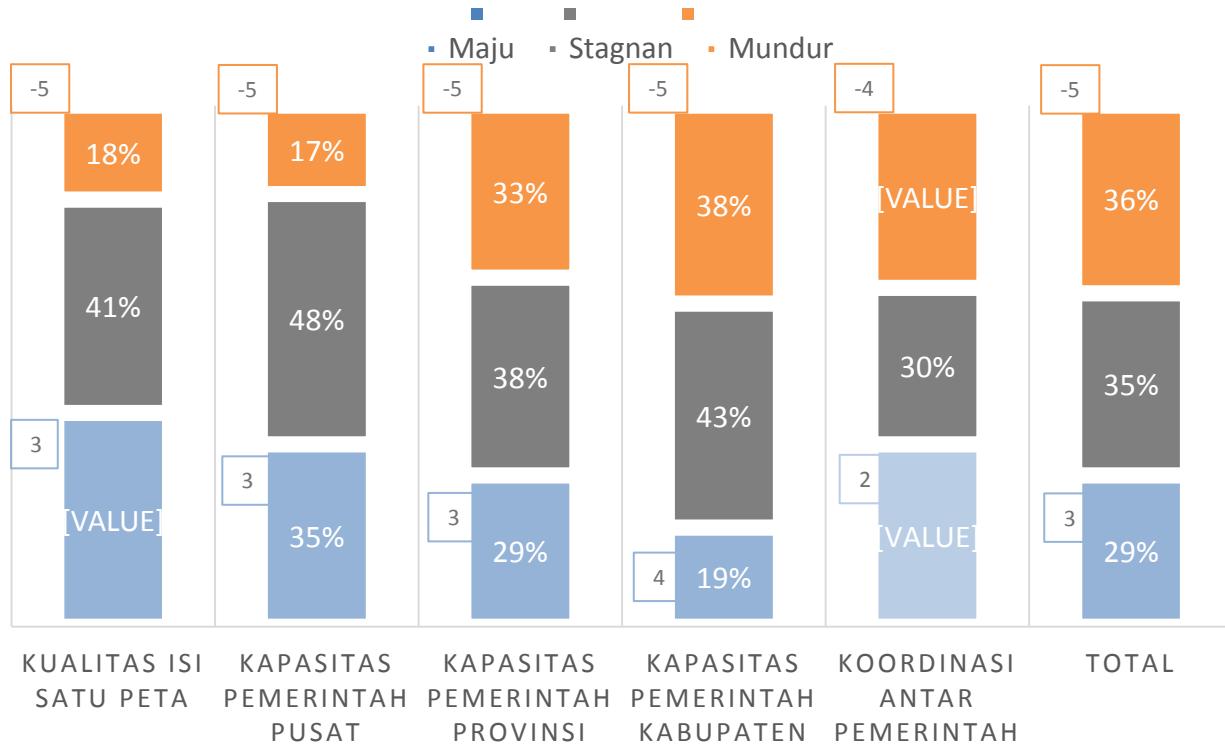
INDIKATOR 1: PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN, PENATAAN RUANG & WILAYAH ADAT														RATA - RATA
INDIKATOR	Aceh	Sumut	Sumbar	Riau	Sumsel	Babel	Lampung	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Kalimantan Selatan	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Barat	PER INDIKATOR
Tim IP4T	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1
Hak-hak atas tanah masyarakat	-1	-1	1	-1	0	0	1	0	0	0	-1	-1	-1	-0.3
Informasi penggunaan kawasan	-1	-1	-1	1	0	-1	0	0	-1	1	-1	-1	-1	-0.5
Tidak sesuai prosedur	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-0.8
TOTAL	-4	-4	-2	-2	-1	-1	0	-1	-2	2	-4	-4	-4	
RATA-RATA PROVINSI	-1	-1	-0.5	-0.5	-0.25	-0.25	0	-0.25	-0.5	0.5	-1	-1	-1	
RATA-RATA INDONESIA	-0.5													- 0.52
INDIKATOR 2: PENATAAN PERIZINAN DAN PERKEBUNAN														
Kewajiban keuangan	1	-1	0	1	0	0	0	1	-1	0	-1	0	1	0.1
Rekonsiliasi data perizinan:	-1	-1	-1	0	-1	1	0	1	-1	-1	-1	-1	-1	-0.5
TOTAL	0	-2	-1	1	-1	1	0	2	-2	-1	-2	-1	0	-0.5
RATA-RATA	0	-1	-0.5	0.5	-0.5	0.5	0	1	-1	-0.5	-1	-0.5	0	
RATA-RATA INDONESIA	0.0													0.36
INDIKATOR 3: PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT														
Informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak	0	-1	0	-1	0	0	1	-1	-1	-1	1	1	1	-0.1
Pengajuan izin	-1	-1	-1	-1	1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-0.8
Informasi SDH dan Perkebunan	-1	-1	1	-1	0	0	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-0.4
TOTAL	-3	-3	0	-3	2	0	3	2	-2	0	-3	-3	-1	
RATA-RATA	-1	-1	0	-1	0.67	0	1	0.67	-0.67	0	-1	-1	-0.33	
RATA-RATA INDONESIA	-0.3													-0.3 ⁸

Lanjutan

INDIKATOR	Aceh	Sumut	Sumbar	Riau	Sumsel	Babel	Lampung	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Kalimantan Selatan	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Barat	RATA - RATA PER INDIKATOR	
INDIKATOR 4: PENYELSAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN															
Desk penyelesaian	-1	-1	-1	-1	-1	0	1	-1	-1	0	-1	-1	-1	1	-0.5
Regulasi	-1	-1	-1	-1	0	-1	1	1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-0.5
TOTAL	-2	-2	-2	-2	-1	-1	2	0	-2	0	-2	-2	-2	0	
RATA-RATA	-1	-1	-1	-1	-0.5	-0.5	1	0	-1	0	-1	-1	-1	0	
RATA-RATA INDONESIA	-0.5													0.5	
INDIKATOR 5: MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI															
Inventarisasi data dan informasi	-1	-1	-1	-1	1	0	1	1	0	1	-1	-1	1	-0.1	
pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan	-1	-1	0	-1	1	0	1	0	-1	0	-1	-1	-1	-1	-0.4
Informasi SDH dan Perkebunan	-1	-1	1	-1	0	0	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-0.4
TOTAL	-3	-3	0	-3	2	0	3	2	-2	0	-3	-3	-3	-1	
RATA-RATA	-1	-1	0	-1	0.67	0	1	0.67	-0.67	0	-1	-1	-1	-0.33	
RATA-RATA INDONESIA	-0.3														-0.3

KEPASTIAN KAWASAN HUTAN

SATU PETA



SKALA

Positif

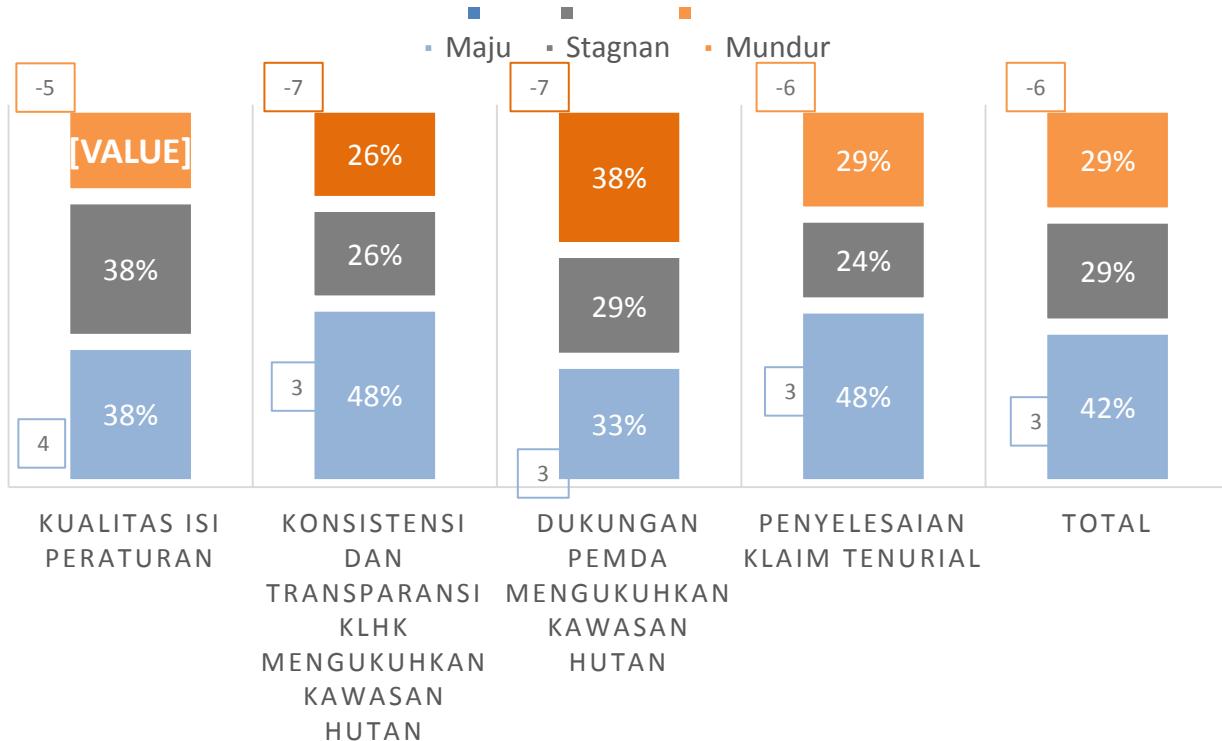
- 1-2
- 3-4
- 5-6
- 7-8
- 9-10

Negatif

- 5-6
- 7-8
- 9-10

*Semakin pekat warnanya,
semakin tinggi skalanya.*

KAWASAN HUTAN



SKALA

Positif

- 1-2
- 3-4
- 5-6
- 7-8
- 9-10

Negatif

- 1-2
- 3-4
- 5-6
- 7-8
- 9-10

Semakin pekat warnanya, semakin tinggi skalanya.

ARAH PENGUKUHAN

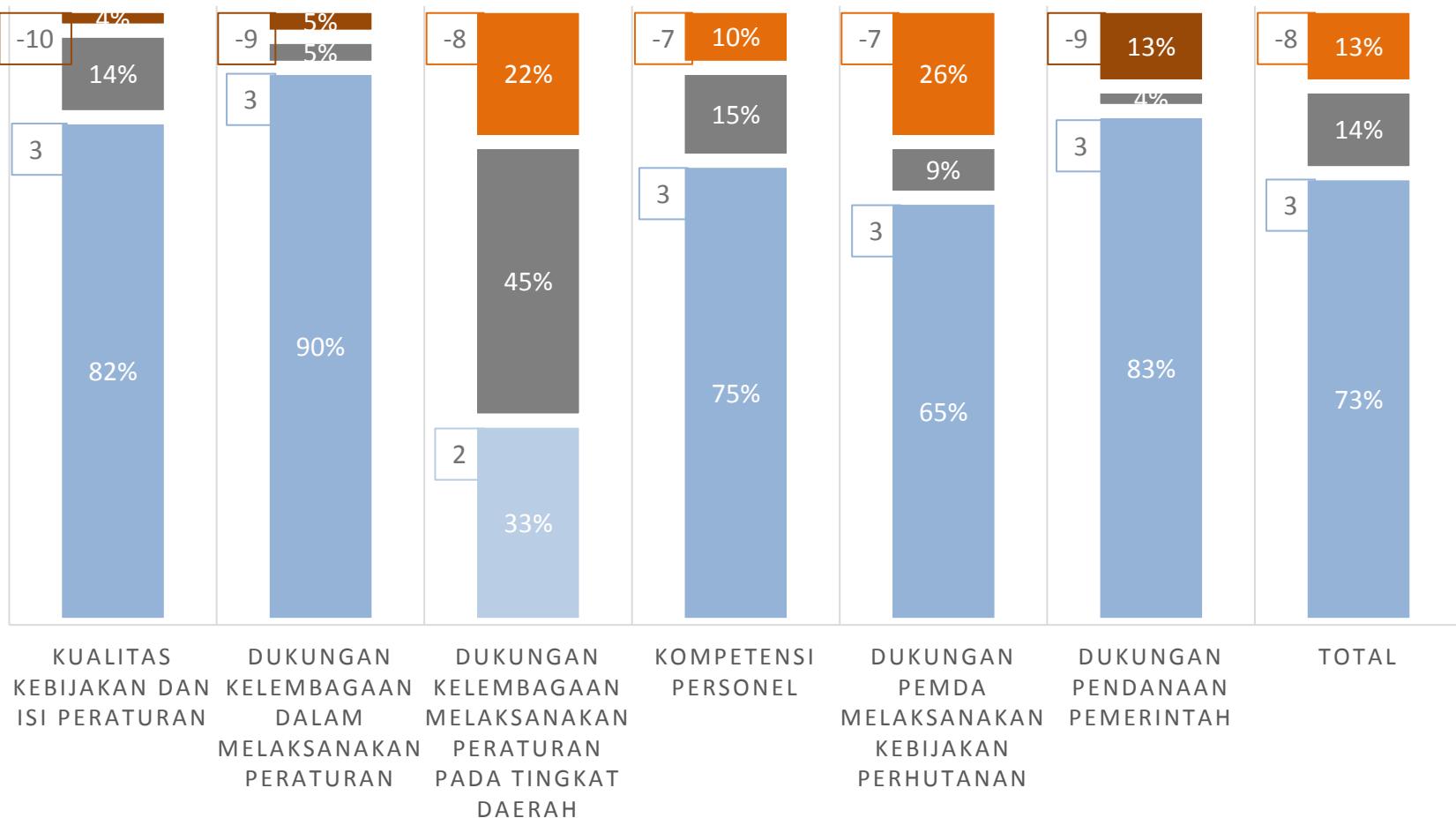
DUALISME KEBENARAN (ADMIN VS SUBSTANTIF)

- Fokus pengukuran dan pemasangan batas dipisahkan dengan fokus identifikasi pihak-3
- Program 2-years dlm lokasi yg sama.
- Ukuran kinerja pada legal & legitimate.

KEADILAN SDH

PERHUTANAN SOSIAL

■ Maju ■ Stagnan ■ Mundur



SKALA

Positif

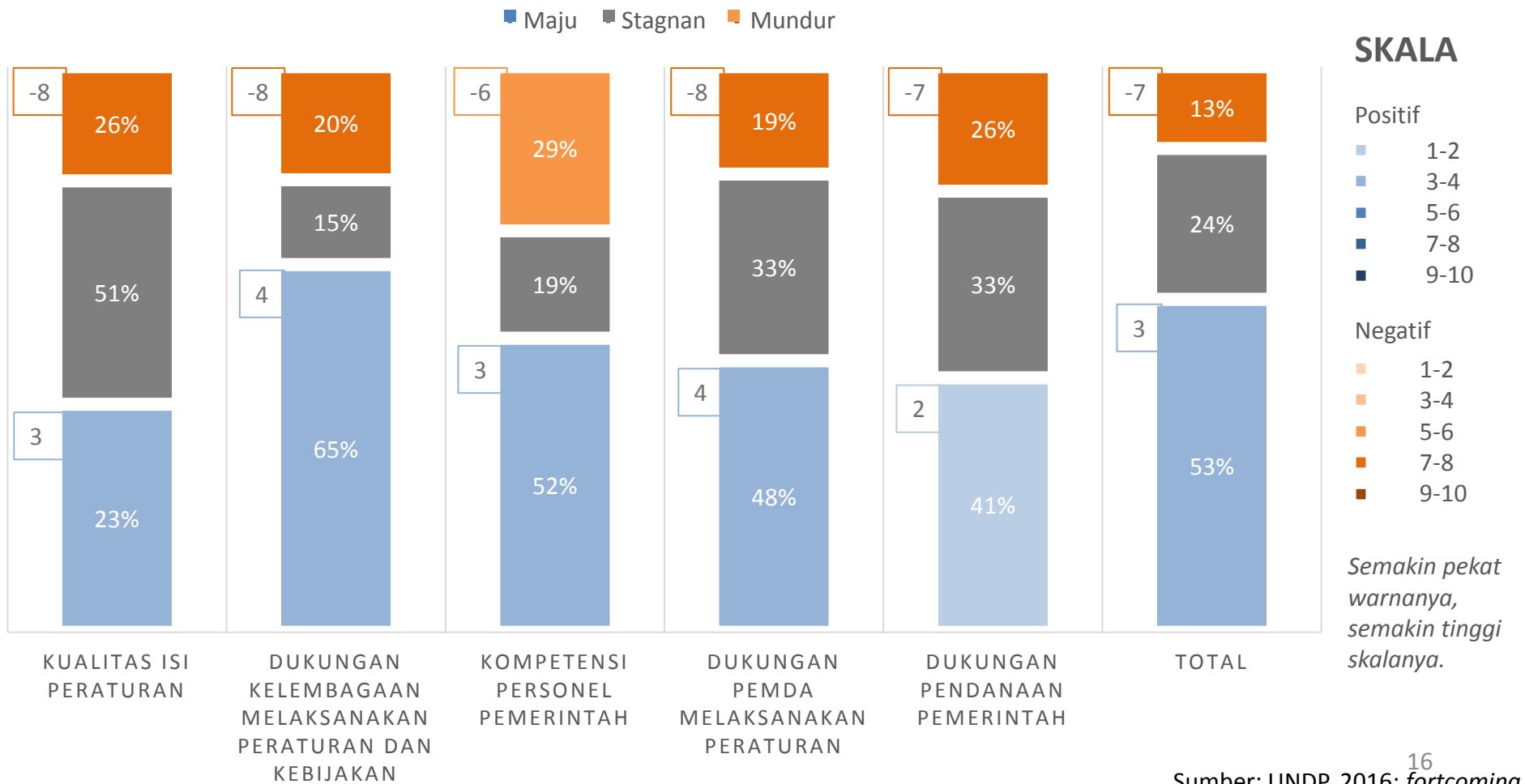
- 1-2
- 3-4
- 5-6
- 7-8
- 9-10

Negatif

- 1-2
- 3-4
- 5-6
- 7-8
- 9-10

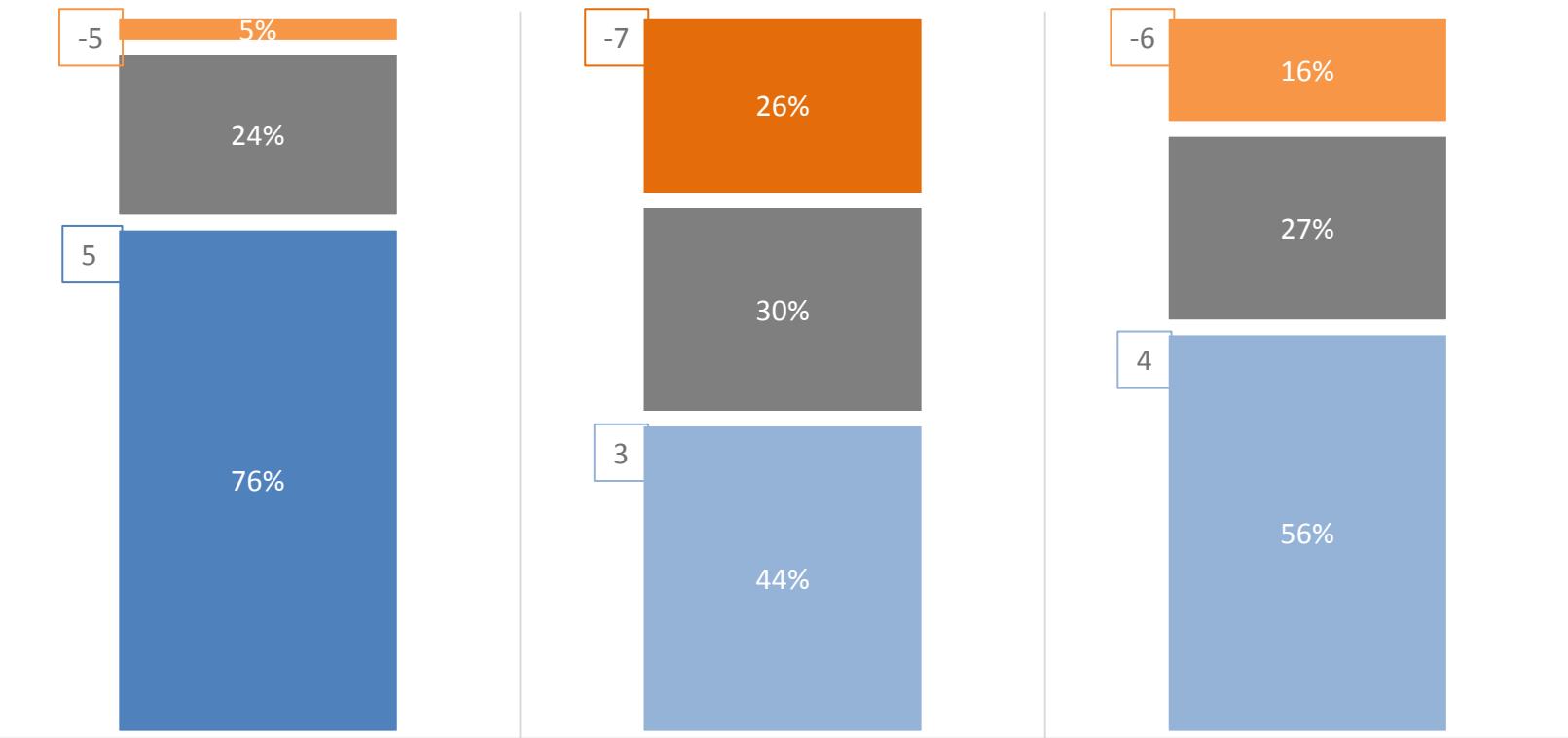
Semakin pekat warnanya,
semakin tinggi skalanya.

PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN HUTAN ADAT



KAPASITAS NON STATE ACTOR

■ Maju ■ Stagnan ■ Mundur



PERAN LSM MELAKUKAN
PENDAMPINGAN MASYARAKAT

DUKUNGAN PELAKU USAHA
MELAKSANAKAN KEBIJAKAN SDH
PADAMASYARAKAT

TOTAL

SKALA

Positif

- 1-2
- 3-4
- 5-6
- 7-8
- 9-10

Negatif

- 1-2
- 3-4
- 5-6
- 7-8
- 9-10

Semakin pekat warnanya,
semakin tinggi skalanya.

ARAH ALOKASI SCR ADIL

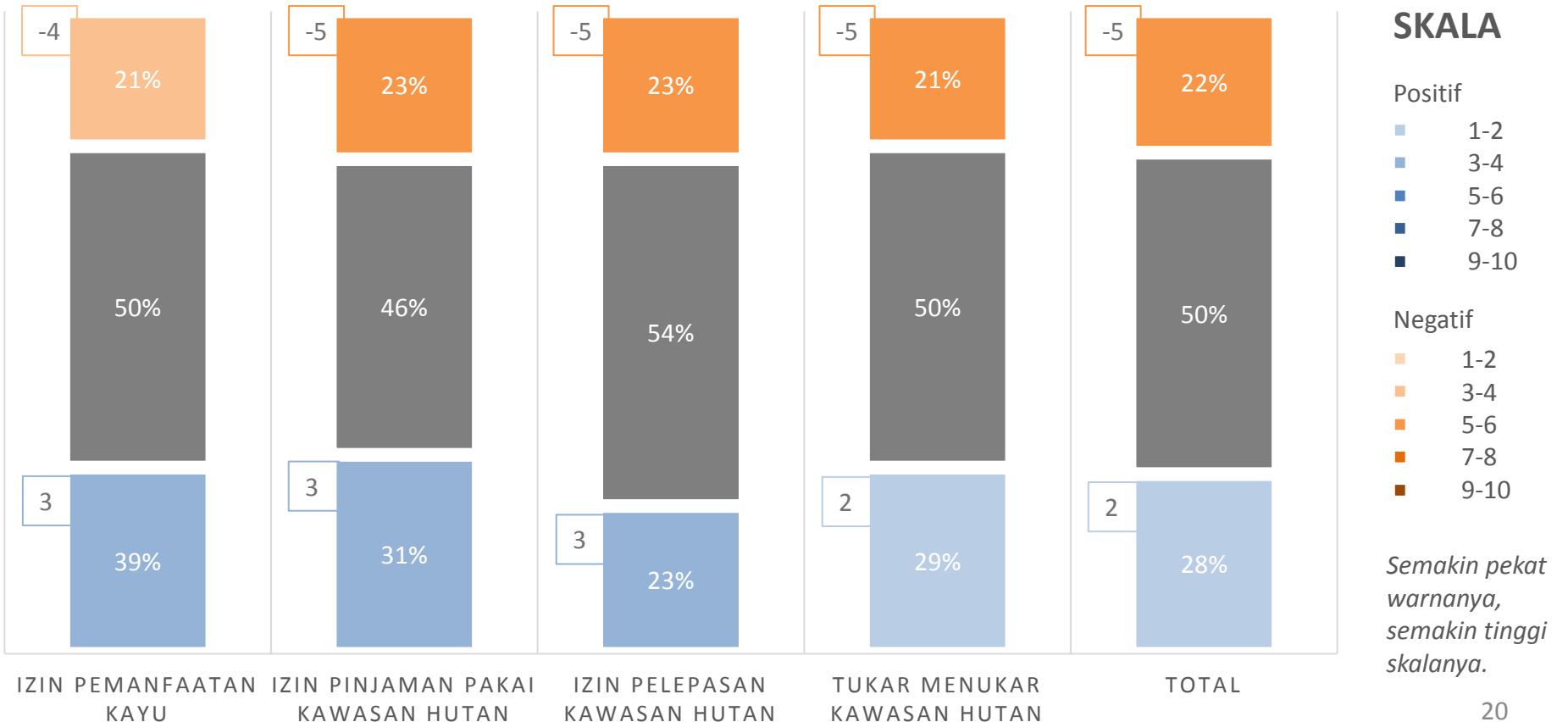
GAP KEBIJAKAN POLITIK DAN OPERASIONALNYA

- Kapasitas kelembagaan daerah/pokja/KPH mempertemukan subyek/masy & obyek/hutan untuk generate income.
- Memastikan penetapan UU-MHA—juga untuk pengembangan ekonomi vs alt-institusi/legal-administratif/web of power [40 kasus Komnas]

KELOLA KAWASAN & PERIZINAN

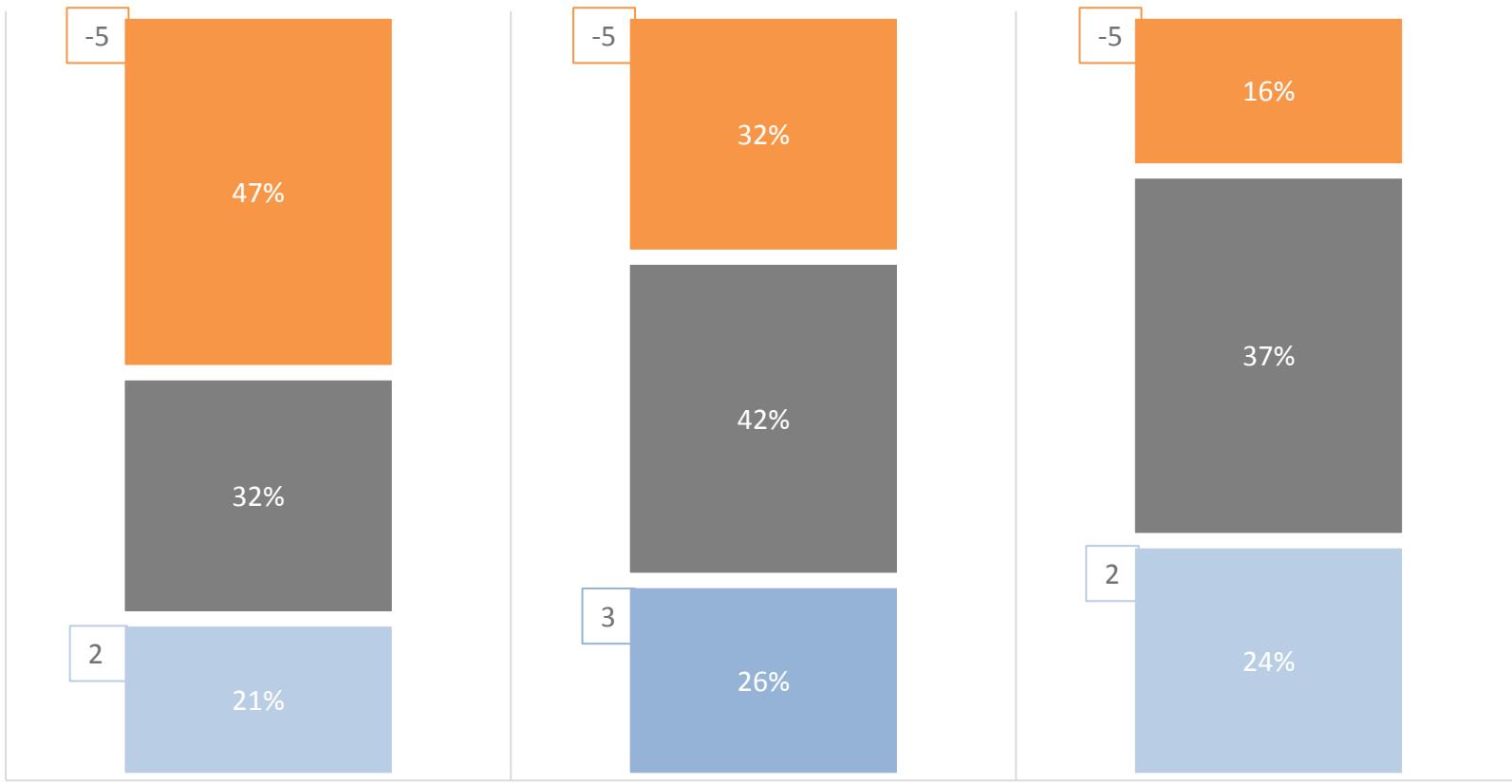
TERKAIT KAWASAN HUTAN

■ Maju ■ Stagnan ■ Mundur



KEBIJAKAN LAIN

■ Maju ■ Stagnan ■ Mundur



SKALA

Positif

- 1-2
- 3-4
- 5-6
- 7-8
- 9-10

Negatif

- 1-2
- 3-4
- 5-6
- 7-8
- 9-10

Semakin pekat warnanya, semakin tinggi skalanya.

MONITORING DAN PENGAWASAN

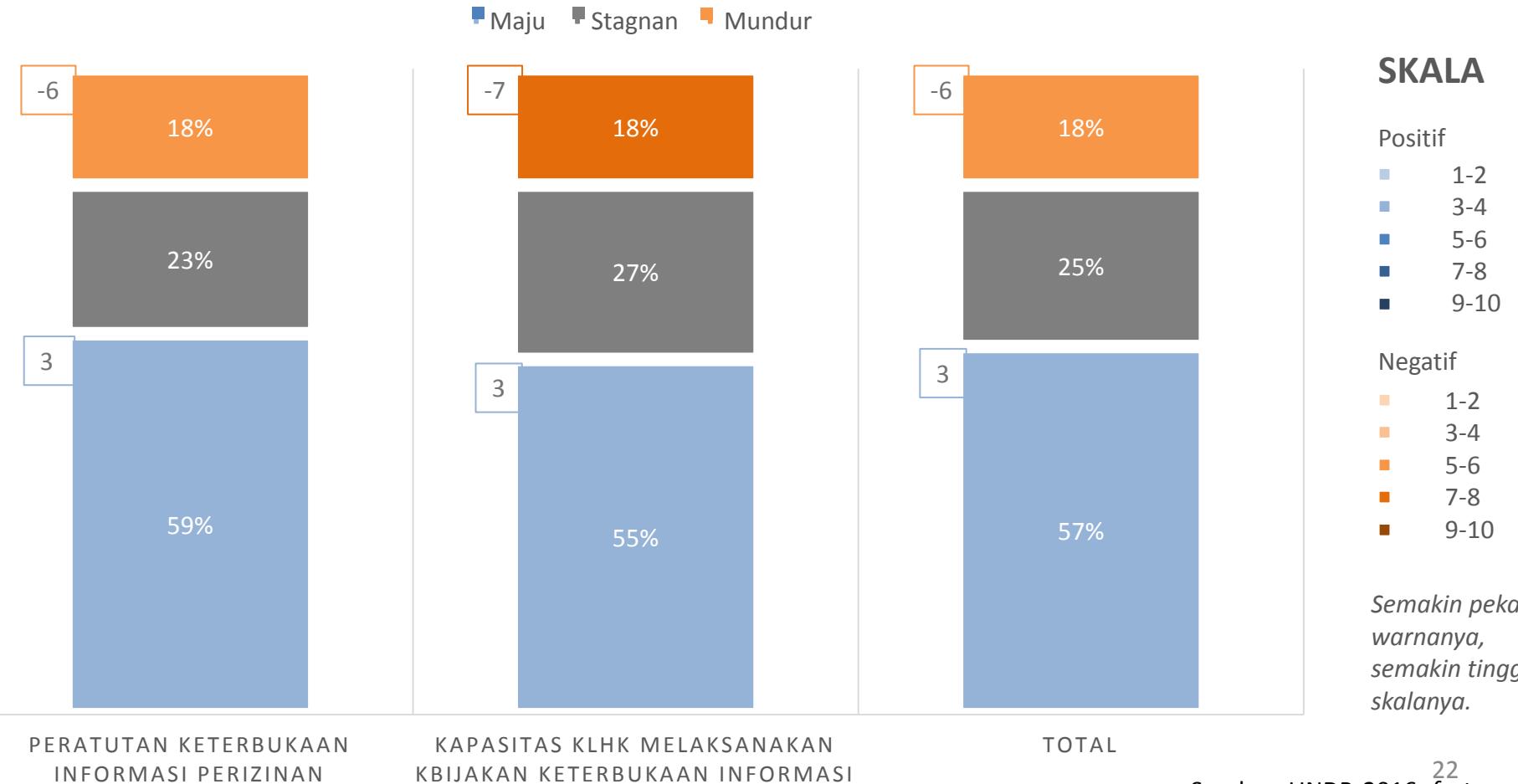
PERLINDUNGAN HUTAN

TOTAL

21

Sumber: UNDP, 2016; *fortcoming*

TRANSPARANSI PERIZINAN



PERATUTAN KETERBUKAAN
INFORMASI PERIZINAN

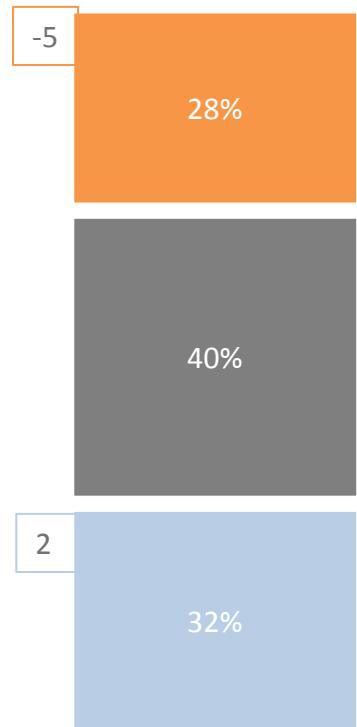
KAPASITAS KLHK MELAKSANAKAN
KBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI

TOTAL

Sumber: UNDP, 2016; *fortcoming*

PENGAWASAN

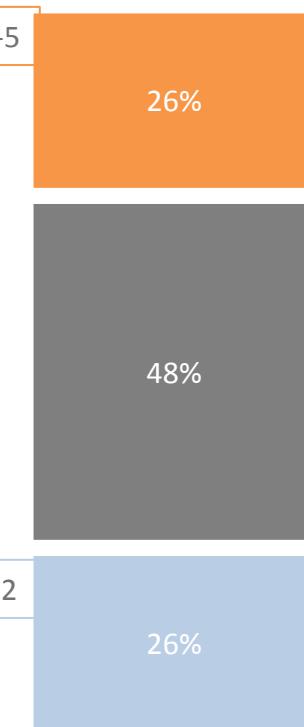
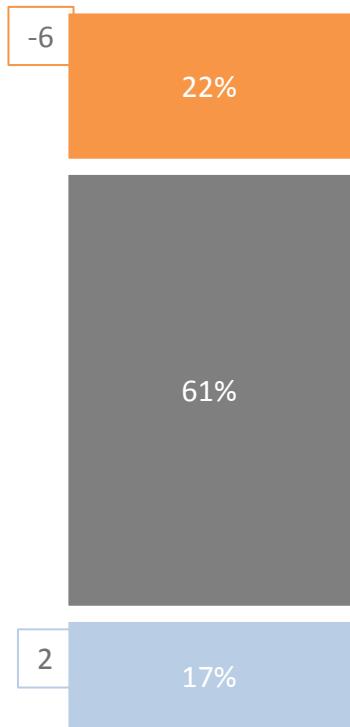
■ Maju ■ Stagnan ■ Mundur



KEMAMPUAN PEMERINTAH
MELAKUKAN PENGAWASAN HUTAN
DARI KEGIATAN ILEGALLOGING

PERAN INSPEKTORAT DALAM
MENGAWASI PENGGUNAAN
ANGGARAN DAN PROGRAM KLHK

TOTAL



SKALA

Positif

- 1-2
- 3-4
- 5-6
- 7-8
- 9-10

Negatif

- 1-2
- 3-4
- 5-6
- 7-8
- 9-10

Semakin pekat warnanya,
semakin tinggi skalanya.

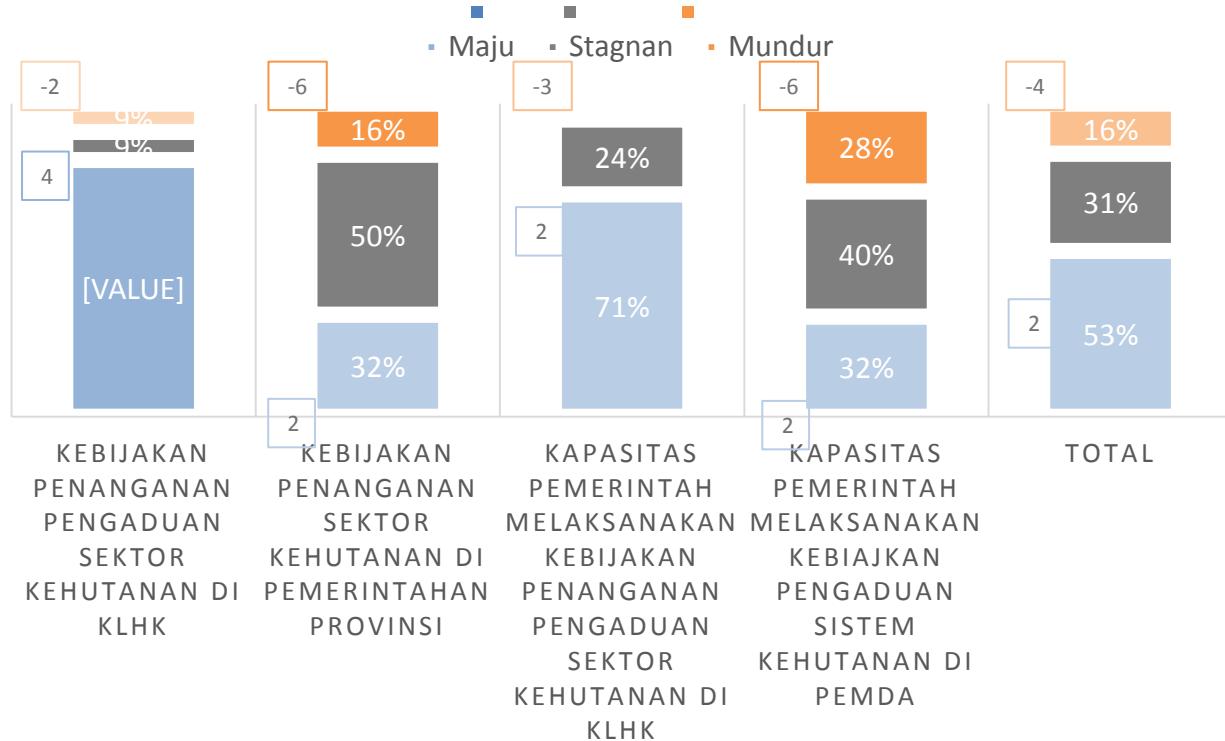
KELOLA KWS DAN PERIZINAN

SOAL HAK MENGUASAI NEGARA ATAS SDA

- Kebenaran informasi kondisi SDH dan integritas tim verifikasi. FGD dng representasi yg tepat.
- RPPLH dan KLHS sebagai dasar kebijakan K/L dan Pemda/RPJMD
- Ketepatan perlindungan kekayaan negara.
- Ketepatan & efisiensi pengawasan menuju outcome

KAPASITAS PENEGAKAN HUKUM

PENANGANAN PENGADUAN



SKALA

Positif

- 1-2
- 3-4
- 5-6
- 7-8
- 9-10

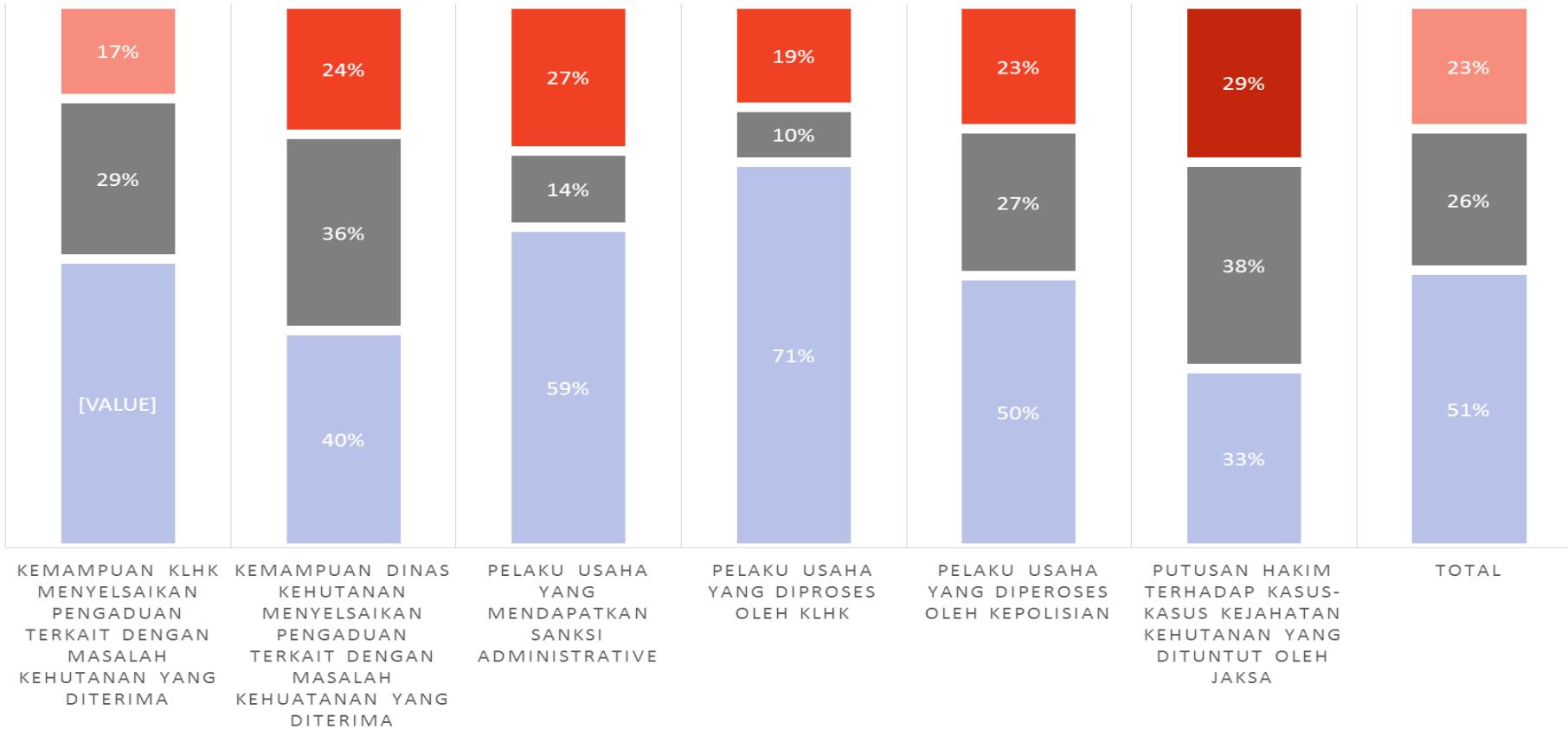
Negatif

- 1-2
- 3-4
- 5-6
- 7-8
- 9-10

Semakin pekat warnanya, semakin tinggi skalanya.

KINERJA

▪ Maju ▪ Stagnan ▪ Mundur



KEMAMPUAN KLHK
MENYELSAIKAN
PENGADUAN
TERKAIT DENGAN
MASALAH
KEHUTANAN YANG
DITERIMA

KEMAMPUAN DINAS
KEHUTANAN
MENYELSAIKAN
PENGADUAN
TERKAIT DENGAN
MASALAH
KEHUTANAN YANG
DITERIMA

PELAKU USAHA
YANG
MENDAPATKAN
SANKSI
ADMINISTRATIVE

PELAKU USAHA
YANG DIPROSES
OLEH KLHK

PELAKU USAHA
YANG DIPEROSES
OLEH KEPOLISIAN

PUTUSAN HAKIM
TERHADAP KASUS-
KASUS KEJAHATAN
KEHUTANAN YANG
DITUNTUT OLEH
JAKSA

TOTAL



**Jalan menuju perbaikan masih panjang,
tapi arah untuk menuju kesana makin jelas**

Terimakasih